

LAPORAN

**PELAKSANAAN SURVEI KEPUASAN MASYARAKAT (SKM)
STASIUN KARANTINA IKAN, PENGENDALIAN MUTU DAN
KEAMANAN HASIL PERIKANAN KENDARI
TRIWULAN III TAHUN 2025**



**BADAN PENGENDALIAN DAN PENGAWASAN MUTU HASIL
KELAUTAN PERIKANAN
KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN
TAHUN 2025**

DAFTAR ISI

DAFTAR ISI	ii
BAB I	1
PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Dasar Pelaksanaan Survei Kepuasan Masyarakat	2
1.3 Maksud dan Tujuan	2
BAB II	4
PENGUMPULAN DATA SKM	4
2.1 Pelaksana SKM	4
2.2 Metode Pengumpulan Data	4
2.3 Lokasi Pengumpulan Data	5
2.4 Waktu Pelaksanaan SKM	5
2.5 Penentuan Jumlah Responden	6
BAB III	7
HASIL PENGOLAHAN DATA SKM	7
3.1 Jumlah Responden SKM	7
3.2 Indeks Kepuasan Masyarakat (Unit Layanan dan Per Unsur Layanan)	9
BAB IV	10
ANALISIS HASIL SKM	10
4.1 Analisis Permasalahan/Kelemahan dan Kelebihan Unsur Layanan	10
4.2 Rencana Tindak Lanjut	11
4.3 Tren Nilai SKM	12
BAB V	13
KESIMPULAN	13
LAMPIRAN	14
1. Kuisisioner Online	14
2. Hasil Pengolahan Data SKM	15
3. Dokumentasi terkait pelaksanaan SKM	16
4. Laporan Hasil Tindak Lanjut SKM Periode Sebelumnya	17

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Undang-undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik dan Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik, mengamanatkan penyelenggara wajib mengikutsertakan masyarakat dalam penyelenggaraan Pelayanan Publik sebagai upaya membangun sistem penyelenggaraan Pelayanan Publik yang adil, transparan, dan akuntabel. Pelibatan masyarakat ini menjadi penting seiring dengan adanya konsep pembangunan berkelanjutan. Serta adanya pelibatan masyarakat juga dapat mendorong kebijakan penyelenggaraan pelayanan publik lebih tepat sasaran.

Dalam mengamanatkan UU No. 25 tahun 2009 maupun PP No. 96 Tahun 2012 maka disusun Peraturan Menteri PANRB No. 14 Tahun 2017 tentang Pedoman Penyusunan Survei Kepuasan Masyarakat (SKM) Unit Penyelenggara Pelayanan Publik. Pedoman ini memberikan gambaran bagi penyelenggara pelayanan untuk melibatkan masyarakat dalam penilaian kinerja pelayanan publik guna meningkatkan kualitas pelayanan yang diberikan. Penilaian masyarakat atas penyelenggaraan pelayanan publik akan diukur berdasarkan 9 (sembilan) unsur yang berkaitan dengan standar pelayanan, sarana prasarana, serta konsultasi pengaduan.

Untuk mengetahui sejauh mana kualitas pelayanan Stasiun Karantina Ikan, Pengendalian Mutu, dan Keamanan hasil Perikanan Kendari sebagai salah satu Unit Pelayanan Publik (UPP) di Badan Pengendalian dan Pengawasan Mutu Hasil Kelautan dan Perikanan (BPPMHKP), maka perlu diselenggarakan survei atau jajak pendapat tentang penilaian pengguna layanan publik terhadap pelayanan yang diberikan. Dengan berpedoman pada Peraturan Menteri PANRB No. 14 Tahun 2017, maka telah dilakukan pengukuran atas kepuasan masyarakat. Hasil SKM yang didapat merangkum data dan informasi tentang tingkat kepuasan masyarakat. Dengan elaborasi metode pengukuran secara kuantitatif dan kualitatif atas pendapat masyarakat, maka akan didapatkan kualitas data yang akurat dan komprehensif.

Hasil survei ini akan digunakan sebagai bahan evaluasi dan bahan masukan bagi penyelenggara layanan publik untuk terus-menerus melakukan perbaikan sehingga kualitas pelayanan prima dapat segera dicapai. Dengan tercapainya pelayanan prima maka harapan dan tuntutan masyarakat atas hak-hak mereka sebagai warga negara dapat terpenuhi.

1.2 Dasar Pelaksanaan Survei Kepuasan Masyarakat

- Undang-undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;
- Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang- Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik; dan
- Peraturan Menteri PANRB Nomor 14 Tahun 2017 tentang Pedoman Penyusunan Survei Kepuasan Masyarakat Unit Penyelenggara Pelayanan Publik.

1.3 Maksud dan Tujuan

Tujuan pelaksanaan SKM adalah untuk mengetahui gambaran kepuasan masyarakat yang diperoleh dari hasil pengukuran atas pendapat masyarakat, terhadap mutu dan kualitas pelayanan administrasi yang telah diberikan oleh Stasiun Karantina Ikan, Pengendalian Mutu, dan Keamanan hasil Perikanan Kendari

Adapun sasaran dilakukannya SKM adalah :

1. Mendorong partisipasi masyarakat sebagai pengguna layanan dalam menilai kinerja penyelenggara pelayanan;
2. Mendorong penyelenggara pelayanan publik untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik;
3. Mendorong penyelenggara pelayanan publik untuk menjadi lebih inovatif dalam menyelenggarakan pelayanan publik; dan
4. Mengukur kecenderungan tingkat kepuasan masyarakat terhadap pelayanan publik yang diberikan.

Dengan dilakukan SKM dapat diperoleh manfaat, antara lain:

1. Diketahui kelemahan atau kekurangan dari masing-masing unsur dalam penyelenggara pelayanan publik;
2. Diketahui kinerja penyelenggara pelayanan yang telah dilaksanakan oleh unit pelayanan publik secara periodik;
3. Sebagai bahan penetapan kebijakan yang perlu diambil dan upaya tindak lanjut yang perlu dilakukan atas hasil Survei Kepuasan Masyarakat;

4. Diketahui indeks kepuasan masyarakat secara menyeluruh terhadap hasil pelaksanaan pelayanan publik pada lingkup Pemerintah Pusat dan Daerah;
5. Memacu persaingan positif, antar unit penyelenggara pelayanan pada lingkup Pemerintah Pusat dan Daerah dalam upaya peningkatan kinerja pelayanan; dan
6. Bagi masyarakat dapat diketahui gambaran tentang kinerja unit pelayanan.

BAB II

PENGUMPULAN DATA SKM

2.1 Pelaksana SKM

Survei Kepuasan Masyarakat dilakukan secara mandiri pada UPP BPPMHKP dengan membentuk tim pelaksana kegiatan Survei Kepuasan Masyarakat. Tim pelaksana Survei Kepuasan Masyarakat (SKM) Stasiun Karantina Ikan, Pengendalian Mutu, dan Keamanan hasil Perikanan Kendari adalah tim yang sesuai DPA pada Kegiatan Pencapaian Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Tahun 2025 (sebagaimana terlampir).

2.2 Metode Pengumpulan Data

Pelaksanaan SKM menggunakan kuesioner *online* melalui link <https://ptsp.kkp.go.id/skm/s/u/36> yang disebarakan kepada pengguna layanan. Kuesioner terdiri atas 9 pertanyaan sesuai dengan jumlah unsur pengukuran kepuasan masyarakat terhadap pelayanan yang diterima berdasarkan Peraturan Menteri PAN dan RB Nomor 14 Tahun 2017 tentang Pedoman Survei Kepuasan Masyarakat Unit Penyelenggara Pelayanan Publik. Kesembilan unsur yang ditanyakan dalam kuesioner SKM Stasiun Karantina Ikan, Pengendalian Mutu, dan Keamanan hasil Perikanan Kendari yaitu :

1. **Persyaratan** : Persyaratan adalah syarat yang harus dipenuhi dalam pengurusan suatu jenis pelayanan, baik persyaratan teknis maupun administratif.
2. **Sistem, mekanisme dan prosedur** : Prosedur adalah tata cara pelayanan yang dibakukan bagi pemberi dan penerima pelayanan, termasuk pengaduan.
3. **Waktu penyelesaian** : Waktu pelayanan adalah jangka waktu yang diperlukan untuk menyelesaikan seluruh proses pelayanan dari setiap jenis pelayanan.
4. **Biaya/ tarif** : Biaya/ tarif adalah ongkos yang dikenakan kepada penerima layanan dalam mengurus dan/atau memperoleh pelayanan dari penyelenggara yang besarnya ditetapkan berdasarkan kesepakatan antara penyelenggara dan masyarakat.
5. **Produk spesifikasi jenis pelayanan** : Produk spesifikasi jenis pelayanan adalah hasil pelayanan yang diberikan dan diterima sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan. Produk pelayanan ini merupakan hasil dari setiap spesifikasi jenis pelayanan.

6. **Kompetensi pelaksana** : Kompetensi pelaksana adalah kemampuan yang harus dimiliki oleh pelaksana meliputi pengetahuan, keahlian, ketrampilan dan pengalaman
7. **Perilaku pelaksana** : Perilaku Pelaksana adalah sikap petugas dalam memberikan pelayanan.
8. **Penanganan pengaduan, saran dan masukan** : Penanganan pengaduan, saran dan masukan, adalah tata cara pelaksanaan penanganan pengaduan dan tindak lanjut.
9. **Sarana dan prasarana** : Sarana adalah segala sesuatu yang dapat dipakai sebagai alat dalam mencapai maksud dan tujuan. Prasarana adalah segala sesuatu yang merupakan penunjang utama terselenggaranya suatu proses (usaha, pembangunan, proyek). Sarana digunakan untuk benda yang bergerak (komputer, mesin) dan prasarana untuk benda yang tidak bergerak (gedung).

2.3 Lokasi Pengumpulan Data

Lokasi dan waktu pengumpulan data dilakukan di lokasi unit pelayanan pada waktu jam layanan sedang sibuk. Sedangkan pengisian kuesioner dilakukan sendiri oleh responden sebagai penerima layanan melalui link kuesioner yang telah disediakan. Dengan cara ini penerima layanan aktif melakukan pengisian sendiri atas himbauan dari unit pelayanan yang bersangkutan.

2.4 Waktu Pelaksanaan SKM

Survei dilakukan secara periodik per-triwulan dengan jangka waktu (periode) yaitu 1 (satu) tahun. Penyusunan indeks kepuasan masyarakat memerlukan waktu selama 4 (empat) bulan dengan rincian sebagai berikut:

No.	Kegiatan	Waktu Pelaksanaan	Jumlah Hari Kerja
1.	Persiapan	Juli 2025	8
2.	Pengumpulan Data	Juli - Sept 2025	60
3.	Pengolahan Data dan Analisis Hasil	Oktober 2025	7
4.	Penyusunan dan Pelaporan Hasil	Oktober 2025	7

2.5 Penentuan Jumlah Responden

Dalam penentuan responden, terlebih dahulu ditentukan jumlah populasi penerima layanan (jumlah pemohon) dari seluruh jenis pelayanan pada Stasiun Karantina Ikan, Pengendalian Mutu, dan Keamanan hasil Perikanan Kendari periode survei sebelumnya. Jika dilihat dari perkiraan jumlah penerima layanan triwulan III tahun 2025, maka populasi penerima layanan pada Stasiun Karantina Ikan, Pengendalian Mutu, dan Keamanan hasil Perikanan Kendari dalam kurun waktu triwulan III tahun 2025 adalah sebanyak 35 orang. Selanjutnya responden dipilih secara acak dari setiap jenis pelayanan besaran sampel dan populasi menggunakan tabel sampel dari Krejcie and Morgan. Berdasarkan Tabel Krejcie and Morgan, jumlah minimum sampel responden yang harus dikumpulkan dalam satu periode SKM adalah 32 orang.

Populasi (N)	Sampel (n)	Populasi (N)	Sampel (n)	Populasi (N)	Sampel (n)
10	10	220	140	1200	291
15	14	230	144	1300	297
20	19	240	148	1400	302
25	24	250	152	1500	306
30	28	260	155	1600	310
35	32	270	159	1700	313
40	36	280	162	1800	317
45	40	290	165	1900	320
50	44	300	169	2000	322
55	48	320	175	2200	327
60	52	340	181	2400	331
65	56	360	186	2600	335
70	59	380	191	2800	338
75	63	400	196	3000	341
80	66	420	201	3500	346
85	70	440	205	4000	351
90	73	460	210	4500	354
95	76	480	214	5000	357
100	80	500	217	6000	361
110	86	550	226	7000	364
120	92	600	234	8000	367
130	97	650	242	9000	368

BAB III

HASIL PENGOLAHAN DATA SKM

3.1 Jumlah Responden SKM

Berdasarkan hasil pengumpulan data, jumlah responden penerima layanan yang diperoleh yaitu 35 orang responden, dengan rincian sebagai berikut :

No	KARAKTERISTIK	INDIKATOR	JUMLAH	PERSENTASE
1	Jenis Kelamin	Laki-laki	17	35%
		Perempuan	18	38%
2	Usia	<25	2	4%
		25-45	29	60%
		46-60	4	8%
		>60	0	0%
3	Pendidikan	SD	0	0%
		SMP	0	0%
		SMA	5	10%
		D3	3	6%
		S1	26	54%
		S2	1	2%
		S3	0	0%
4	Pekerjaan	ASN	0	0%
		TNI/POLRI	0	0%
		Pelaku Usaha KKP	23	48%
		Pegawai Swasta	12	25%
		Wirausaha Non KKP	0	0%
		Pelajar/Mahasiswa	0	2%
5	Jenis Layanan	Uji Profisiensi bagi laboratorium pengujian penyakit ikan, mutu, dan keamanan hasil perikanan	0	0%
		Penyediaan koleksi standar/bahan acuan/kontrol positif	0	0%

		Jasa pengujian hama penyakit ikan karantina, mutu, dan keamanan hasil perikanan, serta kualitas air	5	10%
		Penjaminan Penerapan Program Manajemen Mutu Terpadu/Hazard Analysis and Critical Control Point (PMMT/ HACCP)	7	15%
		Penjaminan kesehatan ikan, mutu, dan keamanan hasil perikanan (Health Certificate for Fish and Fishery Products) untuk pengeluaran dari wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia (Ekspor)	16	33%
		Penerbitan Sertifikat Kelayakan Pengolahan	2	4%
		Penerbitan Sertifikat Penerapan Distribusi Ikan	0	0%
		Penerbitan Sertifikat Cara Penanganan Ikan Yang Baik	1	2%
		Penerbitan Sertifikat Cara Pembenihan Ikan Yang Baik	4	8%
		Penerbitan Sertifikat Cara Budi Daya Ikan Yang Baik	0	0%
		Penerbitan Sertifikat Cara Pembuatan Pakan Ikan Yang Baik	0	0%
		Penerbitan Sertifikat Cara Pembuatan Obat Ikan Yang Baik	0	0%
		Penerbitan Sertifikat Cara Distribusi Obat Ikan Yang Baik	0	0%

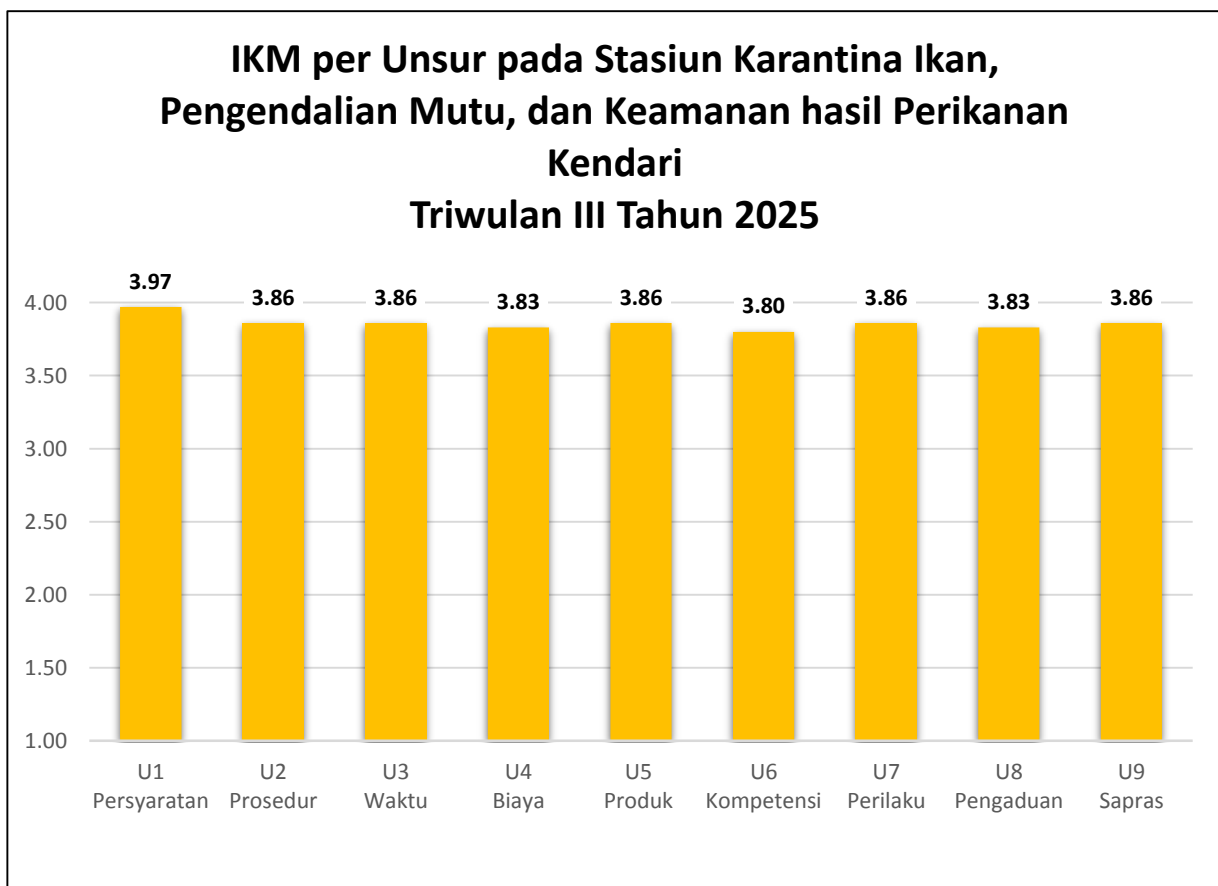
3.2 Indeks Kepuasan Masyarakat (Unit Layanan dan Per Unsur Layanan)

Pengolahan data SKM menggunakan excel template olah data SKM dan diperoleh hasil sebagai berikut :

Tabel 1. Detail Nilai SKM Per Unsur

Nilai Unsur Pelayanan									
	U1	U2	U3	U4	U5	U6	U7	U8	U9
IKM per unsur	3.97	3.86	3.86	3.83	3.86	3.80	3.86	3.83	3.86
Kategori	A	A	A	A	A	A	A	A	A
IKM Unit Layanan	96.43 (A atau Sangat Baik)								

Gambar 1. Grafik Nilai SKM Per Unsur



BAB IV

ANALISIS HASIL SKM

4.1 Analisis Permasalahan/Kelemahan dan Kelebihan Unsur Layanan

Berdasarkan hasil pengolahan data, dapat diketahui bahwa :

1. Dua unsur layanan terendah yang didapatkan ialah Kompetensi mendapatkan nilai terendah yaitu 3.80. Selanjutnya pengaduan mendapatkan nilai 3.83 adalah nilai terendah kedua.
2. Sedangkan satu unsur layanan dengan nilai tertinggi yaitu Persyaratan mendapatkan nilai tertinggi yaitu 3,97.
3. Adapun kondisi permasalahan/kekurangan dari unsur pelayanan dapat digambarkan sebagai berikut :
 - Kompetensi petugas pelayanan masih ada sedikit kekurangan dari segi penjelasan dengan customer.
 - Masih ada beberapa pengaduan pelayanan yang masih kurang respon.

4.2 Rencana Tindak Lanjut

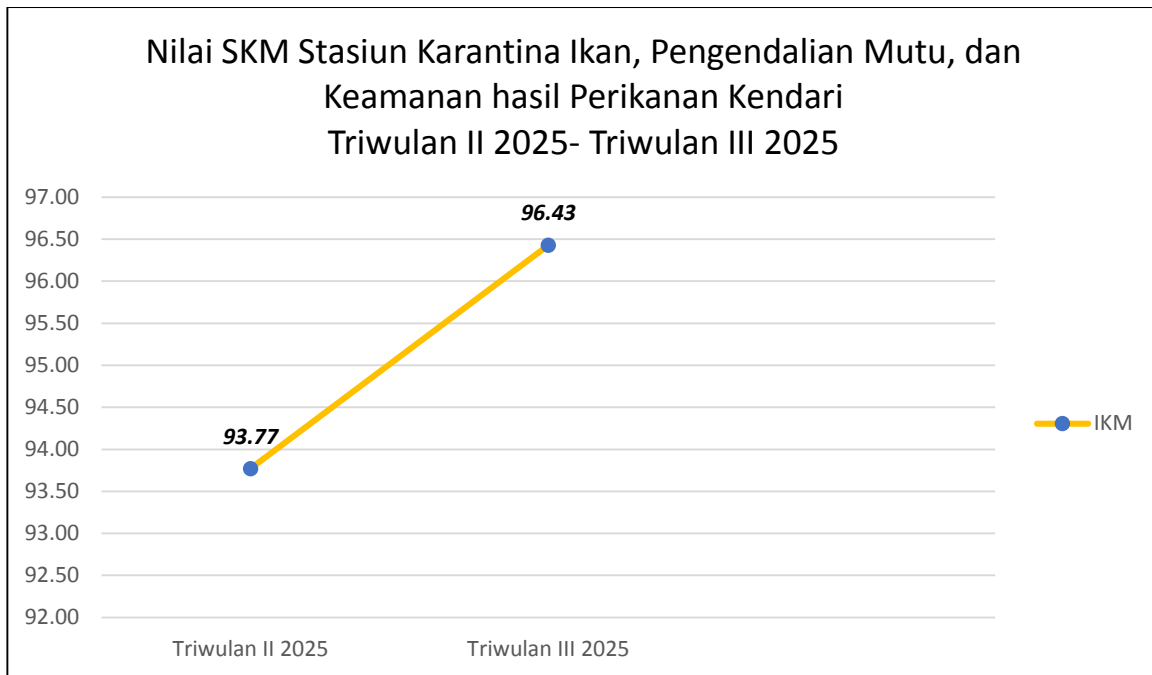
Hasil analisa tersebut dalam rangka untuk perbaikan kualitas pelayan publik maupun pengambilan kebijakan dalam rangka pelayanan publik. Oleh karena itu, hasil analisa ini dibuatkan dan direncanakan tindak lanjut perbaikan. Rencana tindak lanjut perbaikan dilakukan dengan prioritas dimulai dari unsur yang paling rendah hasilnya.

Rencana tindak lanjut perbaikan hasil SKM dituangkan dalam tabel berikut:

No	Prioritas Unsur	Program / Kegiatan	Waktu (Triwulan IV 2025)			Penanggung Jawab
			Okt	Nop	Des	
1	Kompetensi	Rapat internal petugas pelayanan dengan pembahasan terkait pemahaman materi yang terkait dengan sertifikasi yang diterbitkan	√			Tim Pelayanan Publik
2	Pengaduan	Rapat internal petugas pelayanan dengan pembahasan; perlunya respon yang cepat terhadap pengaduan	√			Tim Pelayanan Publik

4.3 Tren Nilai SKM

Untuk membandingkan indeks kinerja unit pelayanan secara berkala atau melihat perubahan tingkat kepuasan masyarakat dalam menerima pelayanan publik diperlukan survei secara periodik dan berkesinambungan. Hasil analisa survei dipergunakan untuk melakukan evaluasi kepuasan masyarakat terhadap layanan yang diberikan, sebagai bahan pengambilan kebijakan terkait pelayanan publik serta melihat kecenderungan (tren) layanan publik yang telah diberikan penyelenggara kepada masyarakat serta kinerja dari penyelenggara pelayanan publik. Tren tingkat kepuasan penerima layanan Stasiun Karantina Ikan, Pengendalian Mutu, dan Keamanan hasil Perikanan Kendari dapat dilihat melalui grafik berikut :



Berdasarkan tabel di atas, dapat disimpulkan bahwa terjadi konsistensi peningkatan kinerja penyelenggaraan pelayanan publik dari periode triwulan II 2025 hingga triwulan III 2025 pada Stasiun Karantina Ikan, Pengendalian Mutu, dan Keamanan hasil Perikanan Kendari

BAB V

KESIMPULAN

Dalam melaksanakan tugas Survei Kepuasan Masyarakat (SKM) selama satu periode Triwulan III mulai Juli hingga September 2025, dapat disimpulkan sebagai berikut:

- Pelaksanaan pelayanan publik di Stasiun Karantina Ikan, Pengendalian Mutu, dan Keamanan hasil Perikanan Kendari, secara umum mencerminkan tingkat kualitas yang Sangat Baik dengan nilai SKM 96.43. Kemudian nilai SKM Stasiun Karantina Ikan, Pengendalian Mutu, dan Keamanan hasil Perikanan Kendari menunjukkan kenaikan kinerja penyelenggaraan pelayanan publik dari triwulan II 2025 hingga triwulan III 2025.
- Unsur pelayanan yang termasuk dua unsur terendah dan menjadi prioritas perbaikan yaitu kompetensi dan pengaduan.
- Sedangkan unsur layanan dengan nilai tertinggi Persyaratan.

Kendari, 06 Oktober 2025

Plt.Kepala Stasiun Karantina Ikan, Pengendalian Mutu, dan Keamanan hasil Perikanan Kendari



Tamrin, S.Pi., M.M

197012072002121002

LAMPIRAN

1. Kuesioner Online

Data Layanan

Pilih Layanan

- Perjanjian Penerapan Program Manajemen Mutu Terpadu/Hazard Analysis and Critical Control Point (PMMT/ HACCP)
- Perjanjian kesehatan ikan, mutu, dan keamanan hasil perikanan (relabel Certificate for Fish and Fishery Products) untuk pengeluan dari wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia (Ekspor)
- Jasa pengujian hama penyakit ikan karantina, mutu, dan keamanan hasil perikanan, serta kualitas air
- Penerbitan Sertifikat Kebijakan Pengalangan
- Penerbitan Sertifikat Penerapan Distribusi Ikan
- Penerbitan Sertifikat Cara Penganganan Ikan Yang Baik
- Penerbitan Sertifikat Cara Pemeliharaan Ikan Yang Baik
- Penerbitan Sertifikat Cara Budi Daya Ikan Yang Baik
- Penerbitan Sertifikat Cara Pembuzulan Pakan Ikan Yang Baik
- Penerbitan Sertifikat Cara Pembuatan Obat Ikan Yang Baik
- Penerbitan Sertifikat Cara Distribusi Obat Ikan Yang Baik

Data Responden

Waktu Survey: 19-Feb-2025 13:19

Nama:

Jenis Usaha: Perseorangan Korporasi

Jenis Kelamin/Gender: Pria/Laki-laki Wanita/Perempuan

Usia: < 25 Tahun 25 s/d 45 Tahun 46 s/d 60 Tahun > 60 Tahun

Pendidikan: SD S1 SMP S2 SMA S3 D3

Pekerjaan: ASN Pegawai Swasta TNI/Polri Wirausaha Non KKP Pelaku Usaha KKP Pelajar / Mahasiswa

Pertanyaan

1. Bagaimana penilaian Bapak/Ibu tentang **kesesuaian persyaratan** pelayanan yang harus dipenuhi dengan persyaratan pelayanan yang diinformasikan?
(Apakah anda/badan hukum/orgnisasi dapat memahami persyaratan pelayanan Penerbitan Sertifikat PMMT/HACCP yang tersedia diurla serta BOPM)

- Sangat sesuai
- Sesuai
- Kurang sesuai
- Tidak sesuai

2. Bagaimana penilaian Bapak/Ibu mengenai **kemudahan prosedur** yang dijalani untuk mendapatkan layanan?

- Sangat Mudah
- Mudah
- Kurang mudah
- Tidak mudah

3. Bagaimana penilaian Bapak/Ibu mengenai **kesesuaian jangka waktu penyelesaian** pelayanan dengan yang diinformasikan?

- Sangat sesuai
- Sesuai
- Kurang sesuai
- Tidak sesuai

4. Bagaimana penilaian Bapak/Ibu mengenai **kesesuaian biaya** pelayanan yang dibayarkan dengan yang diinformasikan?

- Sangat sesuai
- Sesuai
- Kurang sesuai
- Tidak sesuai

5. Bagaimana pendapat Saudara tentang **kesesuaian produk** pelayanan antara yang ada pada publikasi dengan pelayanan yang diberikan?

- Sangat sesuai
- Sesuai
- Kurang sesuai
- Tidak sesuai

6. Bagaimana **kecepatan respon** (membuka halaman, konten, pencarian informasi, unduh/unggah) dari aplikasi sistem pelayanan yang diberikan?

- Sangat Cepat
- Cepat
- Kurang cepat
- Lambat

7. Bagaimana **kemudahan dalam penggunaan fitur** pada aplikasi sistem layanan?

- Sangat Mudah
- Mudah
- Kurang mudah
- Tidak mudah

8. Bagaimana penilaian Bapak/Ibu mengenai **layanan konsultasi dan pengaduan** yang tersedia (sarana pengaduan/kemudahan mengadukan/indak lanjut)?

- Sangat baik
- Baik
- Kurang baik
- Tidak baik

9. Bagaimana penilaian Bapak/Ibu tentang **kuualitas isi/konten** dari aplikasi sistem layanan?

- Sangat baik
- Baik
- Kurang baik
- Tidak baik

Kesimpulan

Apakah petugas telah memberikan pelayanan secara prima (sikap, keterampilan dan penampilan)

☆☆☆☆☆

Kritik dan Saran ***J Harus diisi minimal 3 kata**

[Submisi Form](#)

*J Pastikan anda telah mengisi seluruh pertanyaan **sebelum submisi**

2. Hasil Pengolahan Data SKM

No	Nama_Layanan	Jenis_Kelompok	Usia_Responden	Pendidikan	Pekerjaan	U1	U2	U3	U4	U5	U6	U7	U8	U9	Kritik_Saran	Nilai Per Jenis	NRR Per Jenis															
1	Laporan hasil uji mutu produk perikanan	L	25-45	S1	P_UKPP	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4 prosesnya	100	100.00															
2	Laporan hasil uji mutu produk perikanan	P	25-45	S1	P_UKPP	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4 Mudah sesuai cepat	100	100															
3	Laporan hasil uji mutu produk perikanan	P	25-45	S1	P_UKPP	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4 Sangat mudah alurnya	100	100															
4	Laporan hasil uji mutu produk perikanan	P	25-45	S1	P_UKPP	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4 Sangat baik petugasnya	100	100															
5	Laporan hasil uji mutu produk perikanan	P	25-45	S1	P_UKPP	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4 Sangat baik pelayanannya	100	100															
6	Baik (CPIB)	L	46-60	SMA	P_UKPP	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4 Sangat Sangat Mudah	100	93.33															
7	Baik (CPIB)	L	25-45	SMA	P_UKPP	4	3	4	3	3	4	4	4	4	4 Sangat Baik dan sesuai	88.89																
8	Baik (CPIB)	L	25-45	S1	P_UKPP	4	4	4	3	3	3	4	4	4	4 sangat membantu dan mudah	88.89																
9	Baik (CPIB)	L	25-45	S1	P_UKPP	4	4	3	3	4	3	4	4	4	3 Sangat Cepat dan Mudah	88.89																
10	Baik (CPIB)	L	25-45	SMA	P_UKPP	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4 sangat sesuai semuanya	100	100															
11	Sertifikat Kelayakan Pengolahan (SKP)	L	46-60	S1	P_UKPP	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4 sangat mudah dan sesuai	100	100.00															
12	Sertifikat Kelayakan Pengolahan (SKP)	L	25-45	S1	P_UKPP	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4 SANGAT SANGAT BAIK	100	100															
13	Perikanan (SMKHP)	P	<25	S1	swasta	4	4	4	3	4	4	4	4	4	4 Semua sudah sangat sesuai	97.22	97.74															
14	Perikanan (SMKHP)	L	25-45	S1	swasta	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4 berdampak pada hasil dan	100	100															
15	Perikanan (SMKHP)	L	25-45	S1	swasta	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4 tetap dipertahankan.	100	100															
16	Perikanan (SMKHP)	L	25-45	S1	swasta	4	4	4	4	4	3	3	3	3	3 BPPMHP kedepannya semua	88.89																
17	Perikanan (SMKHP)	P	46-60	SMA	swasta	4	3	3	4	3	3	2	3	3	3 memuaskan	77.78																
18	Perikanan (SMKHP)	P	25-45	S1	P_UKPP	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4 sangat baik dan mudah	100	100															
19	Perikanan (SMKHP)	P	25-45	S1	P_UKPP	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4 cepat tepat mudah	100	100															
20	Perikanan (SMKHP)	P	25-45	S1	P_UKPP	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4 sangat sesuai dan cepat	100	100															
21	Perikanan (SMKHP)	L	25-45	SMA	P_UKPP	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4 cepat dan sesuai	100	100															
22	Perikanan (SMKHP)	L	25-45	S1	P_UKPP	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4 Sangat Cepat responnya	100	100															
23	Perikanan (SMKHP)	L	25-45	D3	P_UKPP	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4 Baik baik baik	100	100															
24	Perikanan (SMKHP)	P	25-45	D3	P_UKPP	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4 baik sekali petugasnya	100	100															
25	Perikanan (SMKHP)	P	25-45	S1	P_UKPP	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4 SANGAT SESUAI DAN CEPAT	100	100															
26	Perikanan (SMKHP)	P	25-45	S1	P_UKPP	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4 sudah sangat baik	100	100															
27	Perikanan (SMKHP)	L	25-45	S1	P_UKPP	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4 Baik Sekali pelayanannya	100	100															
28	Perikanan (SMKHP)	L	25-45	S1	P_UKPP	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4 Sudah Sangat Sesuai	100	100															
29	Manajemen Mutu Terpadu	P	25-45	S1	wirusaha	4	3	3	3	3	3	3	3	3	3 meningkatkan pelayanan yang	77.78	92.06															
30	Manajemen Mutu Terpadu	P	25-45	S1	swasta	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4 TIDAK ADA SARAN	100	100															
31	Manajemen Mutu Terpadu	P	<25	D3	swasta	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4 sangat baik dan cepat.	100	100															
32	Manajemen Mutu Terpadu	P	25-45	S1	swasta	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4 Kendari sangat PRIMA dan	97.22																
33	Manajemen Mutu Terpadu	L	46-60	S2	swasta	4	3	3	4	4	4	4	4	4	4 pelayanan yg baik, perlu	94.44																
34	Manajemen Mutu Terpadu	P	25-45	S1	swasta	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4 Cara pelayanannya di pertakan	100	100															
35	Manajemen Mutu Terpadu	P	25-45	S1	swasta	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3 BPPMHP sukses selalu	75	75															
JUMLAH NILAI PER-UNSUR						139	135	135	134	135	133	135	134	135																		
RATA-RATA PER-UNSUR						3.97	3.86	3.86	3.83	3.86	3.80	3.86	3.83	3.86																		
NILAI INDEKS PER-UNSUR						0.44	0.43	0.43	0.43	0.43	0.42	0.43	0.43	0.43																		
NILAI INDEKS KEPUJASAN MASYARAKAT						96.43																										
SANGAT BAIK																																
96.43																																

3. Dokumentasi Terkait Pelaksanaan SKM



4. Laporan Hasil Tindak Lanjut SKM Periode Sebelumnya

**Laporan Hasil Tindak Lanjut Pelaksanaan
Survei Kepuasan Masyarakat
Periode Triwulan II Tahun 2025**



**Stasiun Karantina Ikan, Pengendalian Mutu, dan Keamanan
hasil Perikanan Kendari
Badan Pengendalian dan Pengawasan Mutu
Hasil Kelautan dan Perikanan
2025**

BAB I

PENDAHULUAN

Latar Belakang

Dalam laporannya, World Bank menjelaskan bahwa pelayanan publik yang berkualitas hanya dapat dicapai jika ekspektasi dan kebutuhan dari pengguna layanan diakomodir dalam proses penyediaan pelayanan. Hal ini juga sejalan dengan salah satu asas dari penyelenggaraan pelayanan publik yang tertulis dalam Undang - Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik yaitu asas partisipatif. Asas partisipatif selanjutnya diatur dalam bab khusus Pengikutsertaan Masyarakat dalam Penyelenggaraan Pelayanan Publik pada Peraturan Pemerintah Nomor 96 tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang - Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik.

Selanjutnya, Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Kementerian PANRB) sebagai pembina pelayanan publik nasional telah merumuskan berbagai instrumen pengikutsertaan masyarakat dalam pelayanan publik untuk menilai kinerja penyelenggara pelayanan publik. Salah satu instrumen tersebut adalah Survei Kepuasan Masyarakat (SKM) yang lebih lanjut diatur dalam Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 14 Tahun 2017 tentang Pedoman Penyusunan Survei Kepuasan Masyarakat Unit Penyelenggara Pelayanan Publik. Survei Kepuasan Masyarakat merupakan kegiatan pengukuran secara komprehensif tentang tingkat kepuasan masyarakat terhadap kualitas layanan yang diberikan oleh penyelenggara pelayanan publik.

Terdapat beberapa tujuan dari pelaksanaan SKM. Pertama, untuk mendorong partisipasi masyarakat sebagai pengguna layanan dalam menilai kinerja penyelenggara pelayanan. Kedua, mendorong penyelenggara pelayanan menjadi lebih inovatif dalam menyelenggarakan pelayanan publik. Terakhir, untuk mengukur kecenderungan tingkat kepuasan masyarakat terhadap pelayanan publik. Untuk

mencapai berbagai tujuan tersebut, maka Stasiun Karantina Ikan, Pengendalian Mutu, dan Keamanan hasil Perikanan Kendari perlu menyusun rencana tindak lanjut dan laporan hasil tindak lanjut sesuai dengan peraturan yang berlaku. Hal ini dimaksudkan agar proses *continuous improvement* dalam proses layanan publik dapat dipastikan dan pada akhirnya terjadi peningkatan kualitas pelayanan publik.

BAB II

DESKRIPSI RENCANA TINDAK LANJUT

Hasil survei kepuasan masyarakat oleh Stasiun Karantina Ikan, Pengendalian Mutu, dan Keamanan hasil Perikanan Kendari periode Triwulan II tahun 2025 menunjukkan angka yang sangat beragam pada berbagai unsur pelayanan seperti dapat terlihat pada tabel di bawah ini:

Tabel 1. Ringkasan Hasil SKM Periode Triwulan II Tahun 2025

No	Unsur	IKM	Mutu Layanan
1	Persyaratan	95.54	A
2	Sistem, Mekanisme, dan Prosedur	95.54	A
3	Waktu Penyelesaian	93.75	A
4	Biaya/Tarif	94.64	A
5	Produk, Spesifikasi, dan Jenis Pelayanan	92.86	A
6	Kompetensi Pelaksana	91.96	A
7	Perilaku Pelaksana	95.54	A
8	Penanganan Pengaduan, Saran, dan Masukan	91.96	A
9	Sarana dan Prasarana	92.86	A

Berkaca pada data di atas, dapat terlihat beberapa unsur yang memerlukan intervensi lanjutan karena rendahnya angka IKM pada unsur tersebut. Oleh karena itu, perlu disusun sebuah rencana tindak lanjut perbaikan terhadap unsur-unsur dengan nilai rendah. Untuk

memastikan rencana tindak lanjut dapat diimplementasikan dan ditindaklanjuti dengan baik, maka perlu disusun skala prioritas perbaikan unsur yang terdiri dari 3 unsur dengan nilai terendah. Kerangka rencana tindak lanjut dari ketiga unsur tersebut, dapat terlihat pada tabel di bawah ini:

Tabel 2. Rencana Tindak Lanjut Pelaksanaan SKM

No	Prioritas Unsur	Program / Kegiatan	Waktu (Triwulan II 2025)			Penanggung Jawab
			Juli	Agust	Sept	
1	Kompetensi	Rapat internal petugas pelayanan dengan pembahasan terkait pemahaman materi yang terkait dengan kompetensi personel		√		Tim Pelayanan Publik
2	Pengaduan	Rapat internal petugas pelayanan dengan pembahasan; perlunya sikap ramah dan sopan terhadap customer		√		Tim Pelayanan Publik
3	Produk	Koordinasi via zoom atau telfon dengan customer dan Memberikan pemahaman terkait sertifikasi yang dikeluarkan melalui Badan Mutu KKP Kendari			√	Tim Pelayanan Publik
4	Sapras	Rapat internal petugas pelayanan dengan pembahasan (kecepatan jaringan internet, kendala aplikasi OSS, aplikasi SIAPMUTU dsb)			√	Tim Pelayanan Publik

BAB III

REALISASI RENCANA TINDAK LANJUT

Berdasarkan rencana tindak lanjut yang telah disusun, maka implementasi yang telah dilaksanakan adalah sebagai berikut:

No	Rencana Tindak Lanjut	Apakah RTL Telah Ditindaklanjuti (Sudah/Belum)	Deskripsi Tindak Lanjut (Mohon Dijabarkan)	Dokumentasi Kegiatan	Tantangan / Hambatan
1	Rapat internal petugas pelayanan dengan pembahasan terkait pemahaman materi yang terkait dengan kompetensi personel	Sudah	Melaksanakan rapat internal petugas pelayanan dengan pembahasan terkait pemahaman materi yang terkait dengan kompetensi personel		Tidak ada hambatan saat pelaksanaan
2	Rapat internal petugas pelayanan dengan pembahasan; perlunya sikap ramah dan sopan terhadap customer	Sudah	Melaksanakan rapat internal petugas pelayanan dengan pembahasan; perlunya sikap ramah dan sopan terhadap customer Jenis pelayanan		Tidak ada hambatan saat pelaksanaan

3	Koordinasi via zoom atau telfon dengan customer dan Memberikan pemahaman terkait sertifikasi yang dikeluarkan melalui Badan Mutu KKP Kendari	Sudah	Melaksanakan Koordinasi via zoom atau telfon dengan customer dan Memberikan pemahaman terkait sertifikasi yang dikeluarkan melalui Badan Mutu KKP Kendari		Tidak ada hambatan saat pelaksanaan
4	Rapat internal petugas pelayanan dengan pembahasan (kecepatan jaringan internet, kendala aplikasi OSS, aplikasi SIAPMUTU dsb)	Sudah	Melaksanakan rapat internal petugas pelayanan dengan pembahasan (kecepatan jaringan internet, kendala aplikasi OSS, aplikasi SIAPMUTU dsb)		Tidak ada hambatan saat pelaksanaan

BAB IV

KESIMPULAN

Berdasarkan data-data dalam pelaksanaan tindak lanjut tersebut, sekiranya dapat ditarik beberapa kesimpulan yaitu:

1. Stasiun Karantina Ikan, Pengendalian Mutu, dan Keamanan hasil Perikanan Kendari telah menindaklanjuti rencana tindak lanjut sebanyak 100% .
2. Guna memastikan RTL tetap terimplementasi, maka perlu disusun berbagai strategi untuk mengatasi permasalahan yang ada. Strategi yang dikembangkan untuk mengatasi masalah tersebut, dan mendorong diimplementasikannya RTL antara lain :

No	RTL	Strategi Penyelesaian	Target Waktu Penyelesaian	Penanggung Jawab	Stakeholder Terkait
1	Rapat internal petugas pelayanan dengan pembahasan terkait pemahaman materi yang terkait dengan kompetensi personel	Rapat internal petugas pelayanan dengan pembahasan terkait pemahaman materi yang terkait dengan kompetensi personel	<3 bulan	Tim pelayanan publik	Seluruh Pegawai BPPMHKP Kendari
2	Rapat internal petugas pelayanan dengan pembahasan; perlunya sikap ramah dan sopan terhadap	Rapat internal petugas pelayanan dengan pembahasan; perlunya sikap ramah dan sopan	<3 bulan	Tim pelayanan publik	Seluruh Pegawai BPPMHKP Kendari

	customer	terhadap customer			
3	Koordinasi via zoom atau telfon dengan customer dan Memberikan pemahaman terkait sertifikasi yang dikeluarkan melalui Badan Mutu KKP Kendari	Koordinasi via zoom atau telfon dengan customer dan Memberikan pemahaman terkait sertifikasi yang dikeluarkan melalui Badan Mutu KKP Kendari	<3 bulan	Tim pelayanan publik	Seluruh Pegawai BPPMHKP Kendari & Customer / Pengguna Jasa
4	Rapat internal petugas pelayanan dengan pembahasan (kecepatan jaringan internet, kendala aplikasi OSS, aplikasi SIAPMUTU dsb)	Rapat internal petugas pelayanan dengan pembahasan (kecepatan jaringan internet, kendala aplikasi OSS, aplikasi SIAPMUTU dsb)	<3 bulan	Tim pelayanan publik	Seluruh Pegawai BPPMHKP Kendari

Kendari, 06 Oktober 2025

Pt. Kepala Stasiun Karantina Ikan, Pengendalian Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan Kendari



Tamrin S.Pi., M.M

NIP. 197012072002121002

